



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PASURUAN**

Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan
Jl.Raya Raci KM 09 - Pasuruan Telp.(0343) 5616126

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat diselesaikan tanpa halangan suatu apapun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pasuruan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan atas pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2022. Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 ini merupakan kinerja berbasis outcome yang menjadi kewenangan Kepala Dinas dalam penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran 2022.

Tidak lupa kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan segala sumbangsih pemikiran dan amal bakti yang telah diberikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga senantiasa mendapatkan limpahan Rahmat dan Hidayahnya dari Allah SWT. Amien.

Pasuruan, Januari 2023

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pasuruan



DIANO VELA FERY S, S.Sos, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19731116 199203 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. GAMBARAN UMUM OPD	3
D. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL	11
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI	13
F. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)	14
G. DASAR HUKUM	15
H. SISTEMATKA PENYUSUNAN	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	19
A. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	19
B. SASARAN STRATEGIS	19
C. TARGET KINERJA TAHUN 2022	19
D. PROGRAM KERJA	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
B. REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV. PENUTUP	44

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
- Lampiran 2 : Matriks Rencana Strategis Disperindag Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023
- Lampiran 3 : Matriks Pencapaian Sasaran Tahun 2022
- Lampiran 4 : Anggaran dan Realisasi Belanja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan TA. 2022
- Lampiran 5 : Matriks Pencapaian Kinerja dan Anggaran Disperindag Tahun 2022
- Lampiran 6 : Penghargaan Pemenang I "Lomba Desain Sulam Bordir Jawa Timur Tahun 2022" dari Provinsi Jawa Timur dan Penghargaan Atas "Produk Unggulan Berpotensi Tahun 2022" dari Dewan Kerajinan Nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban lembaga atas otoritas, peranan, fungsi, dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun sebagai akibat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan merupakan instansi yang menjalankan tugas membantu Bupati Pasuruan dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi - fungsi manajemen kinerja secara taat, sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Mengacu dan dilandasi RPJMD Tahun 2018 - 2023 Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta menyepakati landasan - landasan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi untuk Tahun 2022 Pembangunan Kabupaten Pasuruan difokuskan pada “**Kelembagaan Ekonomi Desa**” serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka

disusunlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Disperindag Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang merupakan media untuk memberikan gambaran sejauh mana kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan visi dan misi dalam membangun Kabupaten Pasuruan seutuhnya, yang disusun secara sistemik dan melembaga.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi pencapaian sasaran serta indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Disperindag Kabupaten Pasuruan di masa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan anggaran yang digunakan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran.

Selain itu, penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini juga merupakan tindak lanjut pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merespon Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Proporsionalitas;
7. Asas Profesionalitas;
8. Asas Akuntabilitas.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan selain untuk memenuhi

tuntutan akuntabilitas, juga memuat komitmen kuat dari Pemerintah kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang menjadi pilar terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan tindak lanjut dari peraturan yang ada dan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban guna peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (*feedback*) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah bentuk laporan yang sekaligus menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan, program / kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan, maka penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan ini bertujuan untuk :

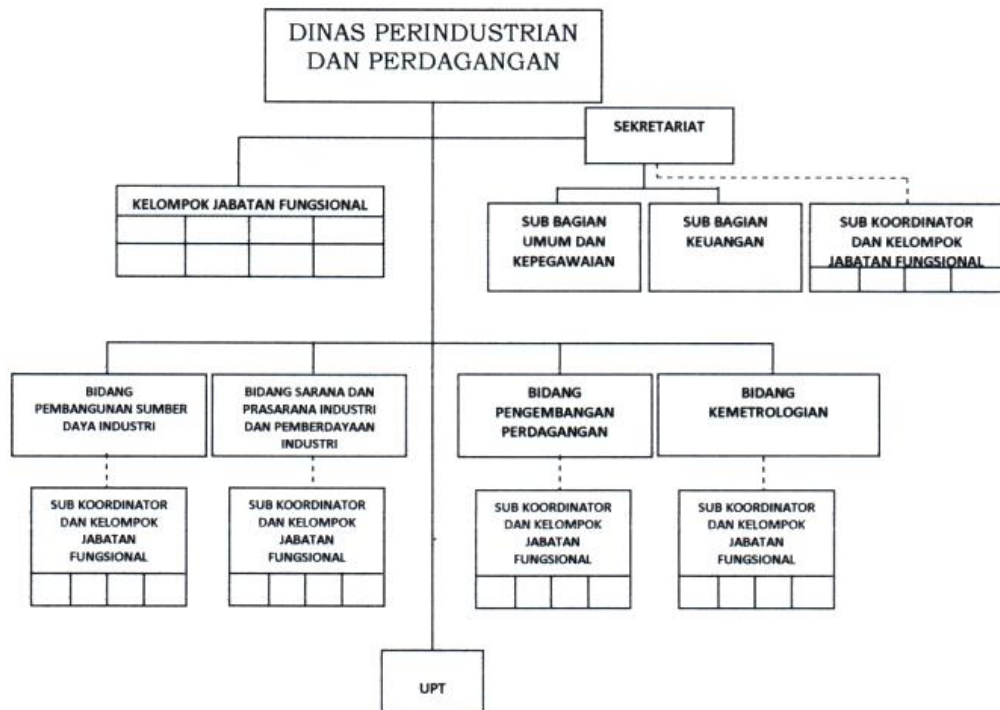
1. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik dan terpercaya yang pelaksanaannya menitikberatkan pada keterpenuhan aspek efisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi yang juga berkait dengan upaya penggunaan sumberdaya masyarakat secara bijaksana;
2. Memperoleh informasi mengenai kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan selama satu tahun anggaran;
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja dan juga masukan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.

C. GAMBARAN UMUM OPD

1. Kedudukan

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan tertuang di dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan.

Struktur organisasi Disperindag secara umum terdiri dari :



- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri;
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan;
- e. Bidang Kemetrolgian;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan adm inistrasi dinas bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan
 - b. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi administrasi perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi perlengkapan, barang milik daerah dan/atau barang milik negara
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga kedinasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasipelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan / atau Kementerian terkait;
 - g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tata kelola organisasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- c. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga kedinasan;

- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peta proses bisnis dan dokumen kewajiban penyelenggara pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum dan kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, barang milik daerah dan / atau barang milik negara;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;

- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja Sama;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri

Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana dan Prasarana Industri, dan Pemberdayaan Industri.

Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- f. pengawasan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- g. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;

- h. pengkoordinasian lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- i. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- j. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- k. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- l. pengkoordinasian dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- m. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- o. pengkoordinasian dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;
- p. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
- q. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;
- r. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten);
- s. penerbitan Surat Keterangan Asal; dan
- t. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.
- u. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kemetrologian

Bidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan;

Bidang Kemetrologian, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kerja bidang kemetrologian;
- b. pelaksanaan dalam rangka layanan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- c. pelaksanaan pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- d. pelaksanaan pengelolaan Cap Tanda Tera;
- e. pelaksanaan penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah;
- g. pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- h. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- i. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran;
- j. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
- k. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- l. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- m. pelaksanaan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal; dan
- n. pelaksanaan penyusunan pelaporan pelayanan Tera dan Tera Ulang serta pengawasan kemetrologian.
- o. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UNIT PELAKSANA TEKNIK

Jumlah, Nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.

D. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan sebagai unsur pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan administrasi serta pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pasuruan. Jumlah PNS, PTT dan THL di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sebanyak 318 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1

Jumlah PNS Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Pasuruan
Per 31 Desember Tahun 2022

No.	Komposisi Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Gender	
A.	Pejabat Struktural :		Laki-laki	Perempuan
	Eselon II	1	1	0
	Eselon III	3	1	2
	Eselon IV	2	0	2
	Jumlah	6	2	4
B.	Pejabat Fungsional :			
	Jabatan Fungsional Tertentu	15	10	5
	Jabatan Administrasi	60	56	4
	Jumlah	75	66	9
C.	Jenjang Pendidikan :			
	Pasca Sarjana (S2)	9	4	5
	Sarjana (S1)	19	14	5
	Diploma (D3)	1	1	0
	SLTA	39	36	3
	SLTP	6	6	0
	SD	7	7	0
	Jumlah	81	68	13
D.	Pangkat / Golongan :		Laki-laki	Perempuan
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	0
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	0	1
	Pembina (IV/a)	3	2	1
	Penata Tingkat I (III/d)	13	7	6
	Penata (III/c)	4	3	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	9	8	1
	Penata Muda (III/a)	3	3	0
	Pengatur Tk. I (II/d)	22	19	3
	Pengatur (II/c)	10	10	0
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	7	7	0
	Pengatur Muda (II/a)	1	1	0
	Juru Tk. I (I/d)	7	7	0
No.	Komposisi Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Gender	
	Pangkat / Golongan :		Laki-laki	Perempuan
	Tenaga kontrak	35	31	4
	Tenaga Harian Lepas	199	176	23
	Jumlah	315	275	40

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPAI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SAKIP Kabupaten Pasuruan;
2. Peningkatan kualitas dan sistem pelayanan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
3. Peningkatan sistem administrasi kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
4. Peningkatan kinerja erat kaitannya dengan peningkatan pelayanan administrasi umum terutama peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH;
5. Tertib administrasi dokumen hibah yang sesuai dengan aturan tentang bantuan hibah/ sosial;
6. Pengintegrasian SIPD dan FMIS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;
7. Peningkatan kemampuan administrasi Kelurahan/ Desa maupun Kecamatan yang memadai dan menguasai peraturan perundang undangan;
8. Tertib administrasi kewilayahan dan pembakuan wilayah yang ada di Kabupaten Pasuruan;
9. Pelaksanaan penamaan pembakuan nama rupa bumi yang belum menyeluruh di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
10. Peningkatan Komitmen OPD dalam peningkatan inovasi pelayanan publik One Agency One Inovation;
11. Peningkatan kerjasama daerah, pihak ketiga dan perbatasan wilayah;
12. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait produk hukum;
13. Peraturan Daerah yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati oleh OPD pengusul;
14. Peningkatan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;

- 15. Sinergitas OPD dalam mendukung program Satria Emas;
- 16. Peningkatan kontribusi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat;
- 17. Peningkatan informasi pasar dan sentra-sentra ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai jual produk unggulan Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

F. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/ direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, hendaknya dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan monitoring target (kinerja) jangka menengah dimana terdapat breakdown target kinerja jangka menengah ke dalam target-target tahunan dan periodic yang selaras dan terukur, terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan memonitor kinerja secara periodik, terdapat jadwal, mekanisme/ SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik, terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja, serta terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring	Melakukan monitoring Reviu Renstra, Tindak lanjut dari Penyusunan Laporan Kinerja Pegawai dengan target BA Reviu Renstra dan Laporan Kinerja Tribulanan melalui aplikasi simoneva
2.	Agar pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan mampu mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, serta penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Melakukan penyesuaian program/ kegiatan melalui P-Renja Ta. 2022
3.	Melaksanakan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai	Melaksanakan kegiatan pengarahan dan pembinaan terkait evaluasi

	pada tiap unit kerja terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu	capaian kinerja organisasi dan individu melalui kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.	Agar informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan, untuk melakukan penilaian kinerja	Rapat pembinaan seluruh staf yang dilakukan setiap triwulan
5.	Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dimana dokumen Laporan Kinerja individu menjadi tanggungjawab masing-masing individu	Melaksanakan kegiatan pembinaan terkait kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja individu melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.	Memanfaatkan informasi dalam Dokumen Laporan Kinerja untuk penyesuaian aktivitas kinerja dan perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam perjanjian kinerja dan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya serta untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Melaksanakan Laporan Kinerja Individu melalui aplikasi E-Kinerja dan dilaksanakan per triwulan

G. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum OPD
- D. Jumlah Pegawai Negeri Sipil
- E. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan utama yang sedang di hadapi organisasi
- F. Dasar Hukum
- G. Sistematika Penyusunan

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- B. Sasaran Strategis
- C. Target Kinerja Tahun 2022
- D. Program Kerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022
- B. Realisasi Anggaran
 1. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
 2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV Penutup

Lampiran :

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Matriks Rencana Strategis Disperindag Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023
- Lampiran 2 : Matriks Rencana Strategi Disperindag Tahun 2018-2023
- Lampiran 3 : Matriks Pencapaian Sasaran Disperindag Tahun 2022
- Lampiran 4 : Anggaran dan Realisasi Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA. 2022
- Lampiran 5 : Matriks Pencapaian Kinerja dan Anggaran Disperindag Tahun 2022
- Lampiran 6 : Penghargaan Disperindag Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Ringkasan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No.	Komponen Pokok	Jumlah
1.	Sasaran Strategis	4
2.	Indikator Kinerja	5
3.	Target Kinerja	5
4.	Jumlah Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Rp)	70.050.406.947,-

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 terdiri atas tiga sasaran strategis dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
- 2) Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan
- 4) Meningkatnya Perlindungan Konsumen.

C. TARGET KINERJA TAHUN 2022

Target Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	1.1	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	Jutaan Rupiah	61.895.716,4
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.1	Nilai Sakip OPD	Angka	83
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	3.1	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Jutaan Rupiah	9.766.286,0
		3.2	Nilai Transaksi Perdagangan	Jutaan Rupiah	4.700,0
4.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	4.1	Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi	%	100

D. PROGRAM KERJA

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 tersebut didukung 8 (delapan) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan, serta 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dengan rincian kegiatan/ sub kegiatan :

a) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- Koordinasi, Sinkronasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan rincian kegiatan/ sub kegiatan :

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- d) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- e) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
3. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- Dengan rincian kegiatan/ sub kegiatan :
- a) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat pembelanjaan, dan Izin Toko Swalayan
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b) Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal
- Koordinasi dan sinkronasi layanan penerbitan SKA.
4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Dengan rincian kegiatan/ sub kegiatan :
- a) Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan;
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota.
- b) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Dengan rincian kegiatan/ sub kegiatan :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
 - Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat Kabupaten/ Kota.

6. Program Pengembangan Ekspor

Dengan rincian kegiatan/ sub kegiatan :

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
 - Pameran Dagang Nasional;
 - Pameran Dagang Lokal;
 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan.

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dengan rincian kegiatan/ sub kegiatan :

- a) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- b) Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Dengan rincian kegiatan/ sub kegiatan :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang;
 - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) **Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 1 digunakan indikator kinerja *Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan* yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-1
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	61.895.716,4	n/a	n/a

Sumber Data: BPS Kab. Pasuruan

Tabel III-2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	61.895.716,4	61.896.361,3	65.160.420,3	n/a

Sumber Data: BPS Kab. Pasuruan

Tabel III-3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	62.095.837,6	n/a	n/a

Sumber Data: BPS Kab. Pasuruan

Tabel III-4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2022	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	n/a	-	-

Sumber Data: BPS Kab. Pasuruan

Dari tabel III-1 tersebut di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran 1 dalam Tahun 2022 dapat disimpulkan **Tidak Berhasil** dengan capaian realisasi sebesar n/a dibandingkan dengan target Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan sebesar 65.160.420,31 atau n/a%, dimana target akhir renstra OPD sebesar 62.095.837,6. Indikator kinerja Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut lapangan usaha Industri Pengolahan/ manufacturing. Dalam meningkatkan pertumbuhan Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan di Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan telah melakukan beberapa pelatihan ketrampilan kewirausahaan terkait pelatihan IKM olahan/ mamin. Dengan asumsi semakin banyak pelatihan yang dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan maka semakin tinggi kenaikan Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan di Kab. Pasuruan.

Selain itu beberapa upaya-upaya yang dilakukan OPD terhadap IKM antara lain :

1. Memfasilitasi dan mendorong pengembangan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produksi
2. Memfasilitasi IKM agar lebih berdaya saing melalui program/ kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan
3. Menumbuhkan IKM wirausaha baru melalui pelatihan dan pembinaan, serta program Satrya Emas melalui pendataan dan pendampingan UMKM, meliputi :
 - Fasilitasi peningkatan ketrampilan bagi UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan ketrampilan
 - Fasilitasi Perijinan legalitas Produk UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda daftar Perusahaan (TDP), dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
 - Fasilitasi peningkatan pemasaran produk UMKM dalam bentuk online dan konvensional
 - Pendampingan untuk peningkatan kualitas manajemen pengelolaan usaha UMKM.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 2 digunakan indikator kinerja *Nilai Sakip OPD* yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-5
Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip OPD	83,00	82,60	99,52%

Sumber Data: Inspektorat Kab. Pasuruan

Tabel III-6
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip OPD	83,00	80,054	82,37	82,60

Sumber Data: Inspektorat Kab. Pasuruan

Tabel III-7
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip OPD	84,00	82,60	98,33%

Sumber Data: Inspektorat Kab. Pasuruan

Tabel III-8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2022	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip OPD	82,60	-	-

Sumber Data: Inspektorat Kab. Pasuruan

Dari tabel III-5 tersebut di atas pencapaian kinerja sasaran 2 di Tahun 2022 dapat disimpulkan **Berhasil** dengan capaian realisasi sebesar 82,60 dibandingkan dengan target Nilai SAKIP OPD sebesar 83,00 atau 98,33%, dimana dari target akhir renstra OPD sebesar 84,00. Indikator kinerja Nilai Sakip OPD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Kab. Pasuruan dengan kategori A (Memuaskan).

3) Sasaran 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 3.1 digunakan indikator kinerja *Nilai Perdagangan Besar dan Eceran* yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-9
Pencapaian Kinerja Sasaran 3.1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	9.766.286,0	n/a	n/a

Sumber Data: BPS Kab. Pasuruan

Tabel III-10
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	9.766.286,0	9.734.811,4	10.618.742,7	n/a

Sumber Data: BPS Kab. Pasuruan

Tabel III-11
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	9.797.862,3	n/a	n/a

Sumber Data: BPS Kab. Pasuruan

Tabel III-12
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2022	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	n/a	-	-

Sumber Data: BPS Kab. Pasuruan

Dari tabel III-9 tersebut di atas pencapaian kinerja sasaran 3.1 dalam Tahun 2022 dapat disimpulkan **Tidak Berhasil** dengan capaian realisasi sebesar n/a

dibandingkan dengan target Nilai Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 9.766.286,0 atau n/a%, dimana target akhir renstra OPD sebesar 9.797.862,3. Indikator kinerja Nilai Perdagangan Besar dan Eceran diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Indikator kinerja Nilai Perdagangan Besar dan Eceran pada Bidang Perdagangan diperoleh dari kegiatan perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan. Pada tahun 2022 jumlah pengajuan Surat Keterangan Asal (SKA) yang masuk ke Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan sebanyak 2.302 dokumen.

4) Sasaran 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 3.2 digunakan indikator kinerja *Nilai Transaksi Perdagangan* yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-13
Pencapaian Kinerja Sasaran 3.2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Transaksi Perdagangan	4.700	4.516,1	96,08%

Sumber Data: Bidang Perdagangan

Tabel III-14
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Transaksi Perdagangan	4.700	4.193	5.303	4.516,1

Sumber Data: Bidang Perdagangan

Tabel III-15
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Transaksi Perdagangan	4.900	4.516,1	92,16%

Sumber Data: Bidang Perdagangan

Tabel III-16
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2022	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Transaksi Perdagangan	4.516,1	-	-

Sumber Data: Bidang Perdagangan

Dari tabel III-13 tersebut di atas pencapaian kinerja sasaran 3.2 dalam Tahun 2022 dapat disimpulkan **Berhasil** dengan capaian realisasi sebesar 4.516,1 dimana target telah ditetapkan sebesar 4.700 atau 96,08%. Indikator kinerja Nilai Transaksi Perdagangan pada Bidang Perdagangan diperoleh dari beberapa kegiatan terkait omzet kegiatan pameran antara lain pasar murah, gelar produk, misi dagang dan promosi dagang melalui online baik lokal, nasional maupun regional yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Berikut Tabel Kegiatan Pameran, Pasar Murah, Gelar Produk, Misi Dagang Dan Promosi Dagang Tahun 2022

NO	NAMA KEGIATAN	TGL PELAKSANAAN	LOKASI
1	JCC Jakarta	23 - 27 Maret 2022	Jakarta
2	Bromo Forest	29 Maret 2022	Tosari
3	Produk Display	27 - 29 April 2022	Rest Area Pohgading
4	Monev IKM Mamin	Jan - Maret 2022	Kec. Sukorejo, Kec. Purwosari, Kec. Pandaan, Kec. Gempol dan Kec. Bangil
5	Pengajian Rutin	6 April 2022	Pendopo Kab. Pasuruan
6	Monev IKM Sekar	11 April 2022	Lakmar - Purwosari
7	Pasar Murah Provinsi	5 April 2022	Purwosari
8	Bazar IKM	13 April 2022	Pemkab. Pasuruan - Raci
9	Bazar IKM	20 April 2022	Pemkab. Pasuruan - Raci
10	Pasar Murah	26 - 28 April 2022	Pasar Warungdowo, Pasar Grati dan Pasar Wonorejo

NO	NAMA KEGIATAN	TGL PELAKSANAAN	LOKASI
11	Display Produk	4 Mei 2022	Pemkab. Pasuruan - Raci
12	Monev IKM Mamin	1 Juni 2022	Kec. Grati, Kec. Prigen, Kec. Winongan, Kec. Beji dan Kec. Rejoso
13	Pameran Apkasi	20 - 22 Juli 2022	Jakarta
14	Pameran Hari Jadi Koperasi		Candra Wilwatikta-Pandaan
15	Bazar IKM dalam rangka Perwos	11 Agustus 2022	Pemkab. Pasuruan - Raci
16	Bromo Maraton 9 UMKM		Kec. Tosari
17	Kegiatan Pramuka dan Pengajai	10 - 12 Sept 2022	Candra Wilwatikta-Pandaan

5) Sasaran 4 : Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran 4 digunakan indikator kinerja *Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi* yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-17
Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi	100%	100%	100%

Sumber Data: Bidang Metrologi Legal

Tabel III-18
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2020	2021	2022
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi	50%	75,31%	101,01%	100%

Sumber Data: Bidang Metrologi Legal

Tabel III-19
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi	100%	100%	100%

Sumber Data: Bidang Metrologi Legal

Tabel III-20
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Th 2022	Realisasi Nasional	Keterangan (+/-)
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi	100%	-	-

Sumber Data: Bidang Metrologi Legal

Dari tabel III-17 tersebut di atas pencapaian kinerja sasaran 4 dalam Tahun 2022 dapat disimpulkan **Berhasil**, dengan hasil realisasi sebesar 100%, dibandingkan dengan target sebesar 100% atau 100%. Dengan target akhir renstra OPD sebesar 100% juga sudah melampaui dengan tingkat kemajuan sebesar 100%. Untuk indikator Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi Tahun 2022 diperoleh Bidang Metrologi Legal dari hasil jumlah pengguna pelayanan tera tera ulang (UTTP) diantaranya wajib tera ulang pemilik alat ukur yang berada di Kecamatan, Pasar Rakyat dan Pasar Desa, serta potensi UTTP sentra dunia usaha meliputi SPBU dan Perusahaan-perusahaan yang berada di Kab. Pasuruan. Pada Tahun 2022 target UTTP Bidang Metrologi Legal sebesar 10.100 UTTP dan telah terealisasi sebesar 12.942 UTTP.

B. REALISASI ANGGARAN

- REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Realisasi anggaran dan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 (*unaudited*) tercermin dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III-22
Realisasi Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
TA. 2022

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN					
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Hak Sewa Tempat Pasar dan Pusat Perbelanjaan Yang Menjadi Kewenangan	21.328.300	21.175.000	99,28%	5 %	4,83 %	96,60 %
		Persentase Perusahaan Eksportir Yang Dibina	4.994.500	1.725.000	34,54%	3,73 %	8,59 %	230,29%
1.	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan, dan Izin Toko Swalayan	Persentase unit pasar yang terbina	21.328.300	21.175.000	99,28%	10 %	7,14 %	71,40 %
1.1	Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	21.328.300	21.175.000	99,28%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	Persentase perusahaan yang mengajukan penerbitan SKA	4.994.500	1.725.000	34,54%	3,73 %	8,59 %	230,29%
2.1	Subkegiatan Koordinasi dan sinkronasi layanan penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal	4.994.500	1.725.000	34,54%	2701 Dokumen	2268 Dokumen	83,97 %
B.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting Yang Harganya Stabil	272.154.960	256.002.505	94,06%	100 %	62,95 %	62,95 %
1.	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase komoditi barang pokok dan barang penting yang terpantau	254.614.961	242.207.675	95,13%	100 %	100 %	100,00%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN					
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.1	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	7.444.000	7.180.250	96,46%	22 laporan	21 laporan	95,45 %
1.2	Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	247.170.961	235.027.425	95,09%	1 laporan	2 laporan	200,0 0%
2.	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan pupuk bersubsidi	17.539.999	13.794.830	78,65%	100 %	100 %	100,0 0%
2.1	Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	17.539.999	13.794.830	78,65%	10 laporan	16 laporan	160,0 0%
C.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang berhasil membuat MOU pemesanan	78.841.849	76.406.416	96,91%	25 %	25 %	100,0 0%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase transaksi pemasaran SRG/ PKL dan Kemitraan Gapoktan	78.841.849	76.406.416	96,91%	100 %	71,42 %	71,42 %
1.1	Subkegiatan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	78.841.849	76.406.416	96,91%	100 UMK M	140 UMK M	140,0 0%
D.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Nilai Ekspor	840.906.260	756.264.849	89,93%	80 %	109,9 1 %	137,3 9%
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase nilai transaksi promosi dagang melalui pameran dan misi dagang	840.906.260	756.264.849	89,93%	80 %	89,61 %	112,0 1%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN					
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.1	Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	4.998.770	-	0,00%	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00%
1.2	Subkegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional	352.321.400	309.050.537	87,72%	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	100,00%
1.3	Subkegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	430.036.070	405.283.500	94,24%	60 Pelaku Usaha	78 Pelaku Usaha	130,00%
1.4	Subkegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	50.000.000	41.930.812	83,86%	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	100,00%
1.5	Subkegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	3.550.020	-	0,00%	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00%
E.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.305.248.190	4.202.977.330	97,62%	100 %	124,18 %	124,18 %
1.	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	4.049.242.400	3.947.617.900	97,49%	35 %	28,93 %	82,66 %
1.1	Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	4.049.242.400	3.947.617.900	97,49%	192 unit	190 unit	98,96 %
2.	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pedagang yang terbina	256.005.790	255.359.430	99,75%	15 %	5,31 %	35,40 %
2.1	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	16.790.630	16.652.630	99,18%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2.2	Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	239.215.160	238.706.800	99,79%	800 Dokumen	534 Dokumen	66,75 %

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN					
			TARGET	REALISASI	%	TARG ET	REALI SASI	%
F.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Layanan Tera Tera Ulang Terhadap Potensi UTTP di Kabupaten	134.968.330	133.038.018	98,57%	100 %	128,4 %	128,4 0%
1.	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase UTTP yang tertera	134.968.330	133.038.018	98,57%	100 %	128,4 %	128,4 0%
1.1	Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	114.047.555	113.444.393	99,47%	10100 unit	1294 2 unit	128,1 4%
1.2	Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	20.920.775	19.593.625	93,66%	1000 org	1072 org	107,2 0%
JUMLAH ANGGARAN			5.658.442.389	5.447.589.118	96,27%			

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penyelenggaraan urusan perdagangan dilakukan dengan menjamin pemerataan distribusi, mencegah terjadinya inflasi dan menjaga keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Anggaran belanja langsung tahun 2022 untuk penyelenggaraan urusan perdagangan yang berasal dari sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sebesar Rp. 5.658.442.389,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.447.589.118,00 atau 96,27%. Urusan perdagangan murni berasal dari sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dengan Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri, Program Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan serta Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Tabel III-23
Realisasi Program/ Kegiatan Urusan Perindustrian
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
TA. 2022

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan IKM Olahan yang terbina	44.901.978.082	33.949.342.823	75,61%	1,14 %	2,28 %	200,00 %
		Persentase Peningkatan IKM Kreatif yang terbina	1.829.270.509	1.354.145.656	74,03%	1,14 %	1,44 %	126,32 %
1.	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan IKM Olahan baru yang dibina	44.901.978.082	33.949.342.823	75,61%	1,14 %	2,28 %	200,00 %
		Persentase Peningkatan IKM Kreatif baru yang dibina	1.829.270.509	1.354.145.656	74,03%	1,14 %	1,44 %	126,32 %
1.1	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	601.020.530	488.977.200	81,36%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %
1.2	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1.228.249.979	865.168.456	70,44%	16 Dokumen	9 Dokumen	56,25 %
1.3	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	41.817.198.070	31.699.325.852	75,80%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia				677 Unit	775 Unit	114,48 %
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2000 m ²	1950 m ²	97,50 %
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				11 Titik Lokasi	11 Titik Lokasi	100,00 %

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		ANGGARAN				KINERJA		
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
		Panjang Jalan yang Dilakukan Rekontruksi Jalan				11 Titik Lokasi	10 Titik Lokasi	90,91 %
		Panjang Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi				1 Titik Lokasi	1 Titik Lokasi	100,00 %
		Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Titik Lokasi	0 Titik Lokasi	0,00 %
1.4	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3.084.780.012	2.250.016.971	72,94%	40 Dokumen	32 Dokumen	80,00 %
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	17.660.715.967	16.997.382.869	96,24%	100 %	106,03 %	106,03 %
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	666.627.400	646.891.022	97,04%	100 %	100 %	100,00 %
1.1	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	666.627.400	646.891.022	97,04%	12 laporan	12 laporan	100,00 %
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum	775.151.096	752.344.741	97,06%	100 %	82,81 %	82,81 %
2.1	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	90.269.955	90.059.800	99,77%	3 Paket	3 Paket	100,00 %
2.2	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	119.288.370	119.021.800	99,78%	4 Paket	4 Paket	100,00 %
2.3	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	215.441.971	214.375.116	99,50%	3 Paket	4 Paket	133,33 %
2.4	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	68.101.800	62.694.525	92,06%	12 laporan	10 laporan	83,33 %

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%	TARG ET	REALI SASI	%
2.5	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	282.049.000	266.193.500	94,38%	112 lapor an	90 lapor an	80,36 %
3.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	14.942.226.478	14.392.393.379	96,32%	100 %	102,2 9 %	102,2 9%
3.1	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	9.740.890.273	9.208.218.256	94,53%	82 org- bln	80 org- bln	97,56 %
3.2	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	117.820.000	117.820.000	100,00 %	12 Doku men	12 Doku men	100,0 0%
3.3	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	25.613.277	24.453.027	95,47%	6 lapor an	6 lapor an	100,0 0%
3.4	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5.057.902.928	5.041.902.096	99,68%	24 Doku men	24 Doku men	100,0 0%
4.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	150.656.938	146.522.950	97,26%	100 %	99,98 %	99,98 %
4.1	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	150.656.938	146.522.950	97,26%	7 lapor an	7 lapor an	100,0 0%
5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	101.871.897	91.827.897	90,14%	100 %	100 %	100,0 0%
5.1	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	99.999.897	89.965.397	89,97%	50 org	50 org	100,0 0%

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
5.2	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi penegakan hukum	1.872.000	1.862.500	99,49%	0 org	0 org	0,00 %
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	81.196.500	74.142.000	91,31%	100 %	100 %	100,00 %
6.1	Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	81.196.500	74.142.000	91,31%	3 unit	3 unit	100,00 %
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	942.985.658	893.260.880	94,73%	100 %	128,76 %	128,76 %
7.1	Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	287.478.660	285.044.700	99,15%	3 unit	3 unit	100,00 %
7.2	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	591.866.036	545.183.180	92,11%	80 unit	86 unit	107,50 %
7.3	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63.640.962	63.033.000	99,04%	80 unit	121 unit	151,25 %
JUMLAH ANGGARAN			64.391.964.558	52.300.871.348	81,22%			

Untuk pelaksanaan urusan perindustrian pada Tahun 2022 yang berasal dari sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dengan rincian pagu anggaran sebesar Rp. 64.391.964.558,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.300.871.348,00 atau 81,22%. Urusan perindustrian murni terdiri dari Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.731.248.591,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.303.488.479,00 atau 75,55%. Sedangkan untuk kegiatan penunjang Sekretariat/Rutin memiliki pagu anggaran sebesar Rp.

17.660.715.967,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.997.382.869,00 atau 96,24%.

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing - masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun 2022. Adapun total anggaran yang dikelola oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 21.501.510.443,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 19.878.378.537,00 atau 92,45%.

Tabel III-24
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
TA. 2022

No.	Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Retribusi Daerah		6.048.901.163,00	7.400.445.848,56	122,34%
1	4.1.2.05.01	Retribusi Pelataran	479.576.000,00	542.720.500,00	113,17%
2	4.1.2.05.02	Retribusi Los	578.449.000,00	605.388.600,00	104,66%
3	4.1.2.05.03	Retribusi Kios	3.091.975.000,00	3.338.911.257,00	107,99%
4	4.1.2.11.01	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	500.000.000,00	511.337.200,00	102,27%
5	4.1.2.14.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	709.120.775,00	1.539.453.673,33	217,09%
6	4.1.2.14.02	Retribusi Penyewaan Tanah	504.560.388,00	779.072.150,00	154,41%
7	4.1.2.14.07	Retribusi Pemakaian Alat	185.220.000,00	66.435.000,00	35,87%
8	4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	-	17127468,23	100,00%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah dan diperoleh dari berbagai sumber-sumber pendapatan diantaranya retribusi pengelolaan pasar, retribusi pemakaian kekayaan dan retribusi tera tera ulang dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Pasuruan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kab. Pasuruan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kab.

Pasuruan Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kab. Pasuruan Nomor 54 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan memiliki beberapa potensi untuk memenuhi target PAD yang telah ditetapkan oleh Pemkab. Pasuruan antara lain 14 unit Pasar Rakyat, Delta Permai-Pandaan, Plaza Untung Suropati-Bangil, Plaza Bangil Lama, Swadesi-Bangil, Ceng Hoo-Pandaan, Sentra Kuliner dan IKM-Pogar Bangil, Plaza Purwosari, UPT Kayu & Logam serta Pelayanan Tera Tera Ulang. Pada Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan telah ditetapkan target PAD sebesar Rp. 6.048.901.163,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.400.445.848,56 atau 122,34%.

• **EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dari 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan Tahun 2022 hampir semua program/ kegiatan telah tercapai anggaran sebesar 90%.

Tabel III-25
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
TA. 2022

No.	Sasaran				Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
	Uraian	Indikator Kinerja		Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	1.1	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	0,00	46.731.248.591,00	35.303.488.479,00	75,55	(75,55)
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.1	Nilai Sakip OPD	99,52	17.660.715.967,00	16.997.382.869,00	96,24	3,28
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	3.1	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	0,00	26.322.800,00	22.900.000,00	87,00	(87,00)
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	4.1	Nilai Transaksi Perdagangan	101,10	5.497.151.259,00	5.291.651.100,00	96,26	4,84
5.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	5.1	Prosentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi	100	134.968.330,00	133.038.018,00	98,57	1,43
Total					70.050.406.947,00	57.748.460.466,00	82,44	

BAB IV

PENUTUP

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

LKjIP Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (*feedback*) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait. Dimana Struktur organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan secara umum terdiri dari : Sekretaris; Bidang Industri; Bidang Perdagangan; Bidang Pengelolaan Pasar, dan Bidang Metrologi Legal masing-masing Bidang membawahi beberapa Kasi.

Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan agar indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- b. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Meningkatkan kualitas dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Melaksanakan pemantauan pencapaian kinerja sasaran secara periodik dalam tahun berjalan; dan
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	1.1	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	Jutaan Rupiah	61.895.716,4
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.1	Nilai Sakip OPD	Angka	83
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	3.1	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Jutaan Rupiah	9.766.286,0
		3.2	Nilai Transaksi Perdagangan	Jutaan Rupiah	4.700,0
4.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	4.1	Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi	%	100

MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1.1. Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Unggulan	1.1.1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri - Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Koordinasi, Sinkronasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dan Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri
2.	2.1. Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Unggulan	2.1.1. Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Mebel - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat/Rutin

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	3.1. Meningkatkan Produktivitas Sektor-Sektor Unggulan	3.1.1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat pembelanjaan, dan Izin Toko Swalayan	
				- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	
				- Koordinasi dan sinkronasi layanan penerbitan SKA	
4.	4.1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	4.1.1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Nilai Transaksi Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Pengembangan Perdagangan
				Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan	
				- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
				Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	
				- Pemasaran dan peningkatan pgunaan produk dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota	
				Program Pengembangan Ekspor	
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	
				- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	
				- Pameran Dagang Nasional	
				- Pameran Dagang Lokal	
				- Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
				- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
5.	5.1. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	5.1.1. Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Bidang Kemetrologian
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	
				- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	
				- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	

MATRIKS PENCAPAIAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2022

Sasaran				Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Simpulan	Sumber Data/Bidang Penanggungjawab
Uraian		Indikator Kinerja							
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6) = 5:4	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	1.1	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	Jutaan Rupiah	61.895.716,4	n/a	0,00%	Berhasil	BPS Kab. Pasuruan/Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dan Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.1	Nilai Sakip OPD	Angka	83,00	82,60	99,52%	Berhasil	Inspektorat
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	3.1	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Jutaan Rupiah	9.766.286,0	n/a	0,00%	Berhasil	BPS Kab. Pasuruan/Bidang Pengembangan Perdagangan
		3.2	Nilai Transaksi Perdagangan	Jutaan Rupiah	4.700,0	4.751,8	101,10%	Berhasil	Bidang Pengembangan Perdagangan
4.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	4.1	Prosentase Alat Ukur yang Terstandarisasi	%	100	100	100%	Berhasil	Bidang Kemetrolgian

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TA. 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Bidang Industri				
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	46.731.248.591,00	35.303.488.479,00	75,55
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	46.731.248.591,00	35.303.488.479,00	75,55
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	601.020.530,00	488.977.200,00	
	Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.228.249.979,00	865.168.456,00	70,44
	Koordinasi, Sinkronasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	41.817.198.070,00	31.699.325.852,00	75,80
	Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.084.780.012,00	2.250.016.971,00	72,94
Sekretariat/Rutin				
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.660.715.967,00	16.997.382.869,00	96,24
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.627.400,00	646.891.022,00	97,04
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	666.627.400,00	646.891.022,00	97,04
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	775.151.096,00	752.344.741,00	97,06
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.269.955,00	90.059.800,00	99,77
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.288.370,00	119.021.800,00	99,78
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	215.441.971,00	214.375.116,00	99,50
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.101.800,00	62.694.525,00	92,06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.049.000,00	266.193.500,00	94,38
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.942.226.478,00	14.392.393.379,00	96,32
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.740.890.273,00	9.208.218.256,00	94,53
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.820.000,00	117.820.000,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.613.277,00	24.453.027,00	95,47
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.057.902.928,00	5.041.902.096,00	99,68
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.656.938,00	146.522.950,00	97,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.656.938,00	146.522.950,00	97,26
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.871.897,00	91.827.897,00	90,14
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.999.897,00	89.965.397,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1.872.000,00	1.862.500,00	99,49
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.196.500,00	74.142.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.196.500,00	74.142.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	942.985.658,00	893.260.880,00	94,73
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	287.478.660,00	285.044.700,00	99,15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	591.866.036,00	545.183.180,00	92,11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.640.962,00	63.033.000,00	99,04
Bidang Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Pasar				
3	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	26.322.800,00	22.900.000,00	87,00
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat pembelanjaan, dan Izin Toko	21.328.300,00	21.175.000,00	99,28
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.328.300,00	21.175.000,00	99,28
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah	4.994.500,00	1.725.000,00	34,54
	Koordinasi dan sinkronasi layanan penerbitan SKA	4.994.500,00	1.725.000,00	34,54
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	272.154.960,00	256.002.505,00	94,06
	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Di Tingkat	254.614.961,00	242.207.675,00	95,13
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan	7.444.000,00	7.180.250,00	96,46
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	247.170.961,00	235.027.425,00	95,09
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.539.999,00	13.794.830,00	78,65
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.539.999,00	13.794.830,00	78,65
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	78.841.849,00	76.406.416,00	96,91
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	78.841.849,00	76.406.416,00	96,91
	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota	78.841.849,00	76.406.416,00	96,91
6	Program Pengembangan Ekspor	840.906.260,00	756.264.849,00	89,93
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi	840.906.260,00	756.264.849,00	89,93
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	4.998.770,00	0,00	
	Pameran Dagang Nasional	352.321.400,00	309.050.537,00	87,72
	Pameran Dagang Lokal	430.036.070,00	405.283.500,00	94,24
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000,00	41.930.812,00	83,86
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	3.550.020,00	0,00	0,00
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.305.248.190,00	4.202.977.330,00	97,62
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.049.242.400,00	3.947.617.900,00	97,49
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.049.242.400,00	3.947.617.900,00	97,49
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah	256.005.790,00	255.359.430,00	99,75
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	16.790.630,00	16.652.630,00	99,18
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	239.215.160,00	238.706.800,00	99,79
Bidang Metrologi Legal				
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.968.330,00	133.038.018,00	98,57
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	134.968.330,00	133.038.018,00	98,57
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	114.047.555,00	113.444.393,00	99,47
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.920.775,00	19.593.625,00	93,66
TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)		70.050.406.947,00	57.748.460.466,00	82,44

Matriks Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan												Lampiran 5
No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Anggaran				Sumber Data/Bidang Penanggungjawab	
				Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = 6:5	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	1.1	Nilai Produksi Sektor Industri Pengolahan	Jutaan Rupiah	61.895.716,4	n/a	0,00%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	46.731.248.591,00	35.303.488.479,00	75,55	BPS Kab. Pasuruan/ Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Dan Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri
							Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	46.731.248.591,00	35.303.488.479,00	75,55		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	601.020.530,00	488.977.200,00			
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.228.249.979,00	865.168.456,00	70,44		
							Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	41.817.198.070,00	31.699.325.852,00	75,80		
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.084.780.012,00	2.250.016.971,00	72,94		
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.1	Nilai Sakip OPD	Angka	83,00	82,60	99,52%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.660.715.967,00	16.997.382.869,00	96,24	Sekretariat/Rutin
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.627.400,00	646.891.022,00	97,04		
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	666.627.400,00	646.891.022,00	97,04		
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	775.151.096,00	752.344.741,00	97,06		
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.269.955,00	90.059.800,00	99,77		
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.288.370,00	119.021.800,00	99,78		
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	215.441.971,00	214.375.116,00	99,50		
							Fasilitas Kunjungan Tamu	68.101.800,00	62.694.525,00	92,06		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.049.000,00	266.193.500,00	94,38		
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.942.226.478,00	14.392.393.379,00	96,32		
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.740.890.273,00	9.208.218.256,00	94,53		
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	117.820.000,00	117.820.000,00	100,00		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	25.613.277,00	24.453.027,00			
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.057.902.928,00	5.041.902.096,00	99,68		
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.656.938,00	146.522.950,00	97,26		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.656.938,00	146.522.950,00	97,26		
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.871.897,00	91.827.897,00	90,14		
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.999.897,00	89.965.397,00			
							Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1.872.000,00	1.862.500,00	99,49		
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.196.500,00	74.142.000,00			
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.196.500,00	74.142.000,00			
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	942.985.658,00	893.260.880,00	94,73		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	287.478.660,00	285.044.700,00	99,15		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	591.866.036,00	545.183.180,00	92,11		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.640.962,00	63.033.000,00	99,04		
3	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	3.1	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Jutaan Rupiah	9.766.286,0	n/a	0,00%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	26.322.800,00	22.900.000,00	87,00	BPS Kab. Pasuruan/ Bidang Pengembangan Perdagangan
							Kegiatan Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat pembelanjaan, dan izin Toko Swalayan	21.328.300,00	21.175.000,00	99,28		
							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.328.300,00	21.175.000,00	99,28		
							Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten / Kota yang telah ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	4.994.500,00	1.725.000,00	34,54		
							Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	4.994.500,00	1.725.000,00	34,54		
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	4.1	Nilai Transaksi Perdagangan	Jutaan Rupiah	4.700,0	4.751,8	101,10%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	272.154.960,00	256.002.505,00	94,06	Bidang Pengembangan Perdagangan
							Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	254.614.961,00	242.207.675,00	95,13		
							Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perdagangan	7.444.000,00	7.180.250,00	96,46		
							Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	247.170.961,00	235.027.425,00	95,09		
							Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.539.999,00	13.794.830,00	78,65		
							Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.539.999,00	13.794.830,00	78,65		
							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	78.841.849,00	76.406.416,00	96,91		
							Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	78.841.849,00	76.406.416,00	96,91		
							Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota	78.841.849,00	76.406.416,00	96,91		
							Program Pengembangan Ekspor	840.906.260,00	756.264.849,00	89,93		
							Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	840.906.260,00	756.264.849,00	89,93		
							Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	4.998.770,00	0,00			
							Pameran Dagang Nasional	352.321.400,00	309.050.537,00	87,72		
							Pameran Dagang Lokal	430.036.070,00	405.283.500,00	94,24		
							Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000,00	41.930.812,00	83,86		
							Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	3.550.020,00	0,00			
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.305.248.190,00	4.202.977.330,00	97,62		
							Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.049.242.400,00	3.947.617.900,00	97,49		
							Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.049.242.400,00	3.947.617.900,00	97,49		
							Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	256.005.790,00	255.359.430,00	99,75		
							Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	16.790.630,00	16.652.630,00	99,18		
							Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	239.215.160,00	238.706.800,00	99,79		
3	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	3.1	Prosentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi	(%)	100	100	100,00%	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.968.330,00	133.038.018,00	98,57	Bidang Kemetrologian
							Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	134.968.330,00	133.038.018,00	98,57		
							Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	114.047.555,00	113.444.393,00	99,47		
							Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.920.775,00	19.593.625,00	93,66		
								TOTAL	70.050.406.947,00	57.748.460.466,00	82,44	

**PENGHARGAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021**

Penghargaan Gatra Awards Kategori "IKON APRESIASI PRESTASI ANAK NEGERI DI MASA PANDEMI"
dari Gatra Media Group melalui Bidang Perdagangan dengan Jargon Bupati "Yuk Nonggo"
TAHUN 2021



Penghargaan Atas "Produk Unggulan Berpotensi Tahun 2022"
dari Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) dengan penerima Wins Rajut-Gempol
dengan Produk Karpét Eceng Gondok
(IKM Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan)

